

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan, termasuk pegadaian. Kebijakan moneter perusahaan dan pegadaian merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peranan lembaga keuangan dalam suatu negara sangat penting. Dewasa ini permintaan kredit melalui Perum Pegadaian sudah berkembang dengan sangat pesat. Kredit bukan hanya digunakan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah saja melainkan oleh semua lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup pengguna pegadaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan pegadaian (4 Maret, 2015) dijelaskan bahwa pegadaian mempunyai motto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”, yang didengungkan oleh Perum Pegadaian nampaknya bukan slogan kosong. Dijelaskan pula macam-macam kredit yang ada di perum pegadaian, yaitu KCA (Kredit Cepat Aman), Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia), Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai), Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga), Kremada (Kredit Perumahan Swadaya), KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah), Investa (Gadai Efek), Kucica (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman), Kagum (Kredit Serba Guna untuk Umum), Jasa Taksiran dan Jasa Titipan, Rahn (Gadai Syariah), Arrum (Ar-Rahn untuk

Usaha Mikro Kecil), dan Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi).

Perum Pegadaian sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan pada nasabah, pihak Perum Pegadaian terlebih dahulu melakukan penilaian nasabah (analisis pembiayaan) untuk mengetahui layak atau tidaknya nasabah tersebut menerima pembiayaan. Perusahaan menetapkan kebijakan dalam pemberian kredit antara lain menetapkan standard untuk menerima atau menolak resiko kredit yaitu menentukan siapa yang berhak menerima kredit yang telah memenuhi syarat 5C: bagaimana karakter nasabah (*character*), kapasitas melunasi kredit (*capacity*), kemampuan modal yang dimiliki nasabah (*capital*), jaminan yang dimiliki nasabah untuk menanggung resiko kredit (*collateral*), dan kondisi ekonomi saat ini yang mempengaruhi usaha nasabah (*condition of economic*).

Sebelum memanfaatkan teknologi komputer di bidang sistem informasi, Perum Pegadaian dalam menentukan besar kredit, khususnya Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) mengalami kesulitan. Perum Pegadaian menemui kesulitan besarnya kredit yang akan diberikan kepada konsumen dengan jaminan sertifikat tanah. Dalam hal ini, Perum Pegadaian harus mengirimkan karyawan ke lokasi tanah yang digadaikan, menanyakan harga jual tanah, baru dapat menentukan atau mengambil keputusan besar kredit yang diberikan. Guna memudahkan pengambilan keputusan dalam memberikan besarnya kredit Kreasi, Perum Pegadaian menggunakan teknologi komputer untuk memudahkan kinerjanya.

Adanya perkembangan teknologi komputer di bidang sistem informasi merupakan tanggungjawab pihak manajemen menengah dan puncak yang harus dilakukan secara tepat dan efisien sehingga penyaluran dana kredit tepat kepada calon nasabah yang layak menerima kredit tersebut melalui Sistem Pendukung Keputusan. Teknik pengambilan keputusan yang digunakan dalam analisis kebijaksanaan di Perum Pegadaian adalah AHP (*Analytic Hierarchy Process*). AHP digunakan dalam di Perum Pegadaian yaitu untuk menentukan calon debitur mana yang layak menerima kredit dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh pihak Perum Pegadaian tersebut. Adapun kriteria-kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pihak Perum Pegadaian dalam menentukan calon debiturnya adalah status kredit, produktivitas usaha, kondisi usaha, jaminan, dan kolektibilitas. Walaupun pemilihan calon nasabah yang akan menerima kredit tetap ditentukan sepenuhnya oleh pihak Perum Pegadaian, namun Sistem Pendukung Keputusan ini akan menampilkan nilai prioritas global dari yang tertinggi hingga terendah dari calon nasabah tersebut, sehingga akan memudahkan dan membantu pihak Perum Pegadaian dalam mengambil keputusan.

AHP adalah prosedur yang berbasis matematis yang sangat baik dan sesuai untuk kondisi evaluasi atribut-atribut kualitatif. Atribut-atribut tersebut secara matematik dikuantitatif dalam satu set perbandingan berpasangan. Pada hakekatnya AHP merupakan suatu model pengambil keputusan yang komprehensif dengan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kualitatif dan

kuantitatif. Dalam model pengambilan keputusan dengan AHP pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya. AHP juga memungkinkan ke struktur suatu sistem dan lingkungan kedalam komponen saling berinteraksi dan kemudian menyatukan mereka dengan mengukur dan mengatur dampak dari komponen kesalahan sistem (Saaty, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2009) disebutkan bahwa AHP dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang multikriteria dan cukup baik dalam menyelesaikan permasalahan identifikasi *customer funding* yang membutuhkan banyak kriteria. Amborowati (2008) juga melakukan penelitian dengan metode AHP pada Sistem Penunjang Keputusan pemilihan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul dalam penelitian ini yaitu **“ANALISIS SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT DI PERUM PEGADAIAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penggunaan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pemberian kredit di Perum Pegadaian?
2. Faktor apa yang mempengaruhi perusahaan pegadaian menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK)?

3. Hambatan apa dan bagaimana cara mengatasi digunakannya Sistem Pendukung Keputusan (SPK) di Perum Pegadaian?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian diperoleh dari Kantor Cabang Perum Pegadaian di Surakarta.
2. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) ini hanya sebagai alat bantu bagi pihak Perum Pegadaian dalam menentukan siapa yang layak menerima Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) atau tidak, berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh pihak Perum Pegadaian. Namun keputusan akhir tetap berada di pihak Perum Pegadaian.
3. Metode Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang digunakan di Perum Pegadaian adalah *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah ada tiga, maka tujuan dalam penelitian ini juga ada tiga, yaitu:

1. Ingin mengetahui prosedur penggunaan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pemberian kredit di Perum Pegadaian.
2. Ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi perusahaan pegadaian menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK).

3. Ingin mengetahui hambatan dan bagaimana mengatasi digunakannya Sistem Pendukung Keputusan (SPK) di Perum Pegadaian.

1.5 Manfaat Penelitian

Sistem Pendukung Keputusan diharapkan dapat memberikan keputusan yang dapat membantu Perum Pegadaian dalam menentukan kelayakan pemberian kredit Perum Pegadaian terhadap nasabah.